

Judul : Penanganan bencana, legislator sarankan anggaran khusus
Tanggal : Jumat, 06 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Penanganan Bencana

Legislator Sarankan Anggaran Khusus

ANGGOTA Komisi XI DPR Martin Manurung mengingatkan Pemerintah agar tidak menerapkan pola *no viral no budget* atau menunggu viral baru anggaran turun dalam penanggulangan bencana di daerah. Karena itu, diperlukan kebijakan anggaran yang spesifik dan tidak disamaratakan bagi daerah-daerah terdampak bencana.

"Penanganan bencana berskala besar tidak bisa hanya mengandalkan gotong royong masyarakat, tapi membutuhkan dukungan anggaran negara yang memadai," ucap Martin dalam keterangannya, Selasa (3/2/2026).

Martin menjelaskan, berbagai wilayah di Sumatera Utara (Sumut) seperti Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, hingga Tapanuli Utara mengalami dampak bencana yang serius. Kondisi tersebut menunjukkan bencana kali ini tidak bisa diperlakukan sebagai kejadian rutin tahunan.

Langkah tanggap darurat

memang telah dilakukan, tapi skala kerusakan yang menuntut infrastruktur membuat penanganannya membutuhkan anggaran besar dari negara. "Kalau ini hanya banjir biasa mungkin masih bisa ditangani dengan bantuan sosial. Tapi ini sudah menyangkut infrastruktur, dan itu perlu anggaran negara," tegas politikus Gerindra ini.

Untuk itu, ia meminta Pemerintah Pusat (Pempus) menyusun kebijakan khusus bagi daerah bencana, tanpa terhambat oleh pendekatan efisiensi anggaran yang bersifat umum. Pemerintah jangan melihat persoalan secara makro, tetapi perlu melakukan pendekatan yang lebih mendalam terhadap kondisi riil di daerah terdampak. "Jangan hanya *helicopter view*, tapi perlu *di-zoom*," tandasnya.

Ketua Komisi XI DPR Mukhammad Misbakhun menambahkan, perlakuan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) bagi daerah yang mengalami bencana harus sama. Tidak boleh ada perbedaan



Martin Manurung

antara satu daerah dengan yang lainnya. Termasuk Kabupaten Situbondo yang terkena bencana banjir. "Jangan sampai kemudian merasa suatu daerah lebih diistimewakan dengan daerah yang lain," ucapnya.

Diketahui, Bupati Situbondo, Jawa Timur (Jatim) mengeluh kesulitan dalam menangani bencana banjir di wilayahnya karena kondisi anggaran terbatas yang disebabkan TKD dipangkas oleh Pempus.

Misbakhun melanjutkan, jika ada daerah lain yang mengalami situasi darurat bencana dan kemudian TKD-nya dikembalikan, maka daerah lain yang juga terkena bencana harus mendapat perlakuan yang sama.

"Kami (Komisi XI DPR) akan menyampaikan keluhan tersebut kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dengan kebijakan TKD bagi daerah yang terkena bencana," janji politikus Golkar ini.

Sementara, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mendorong agar faktor kebencanaan dijadikan variabel utama dalam skema TKD dari Pempus. Karena daerah yang kerap dilanda bencana membutuhkan perlakuan fiskal khusus.

Menurutnya, skema TKD saat ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil daerah yang harus mengalokasikan anggaran besar untuk penanganan bencana dan pemulihan ekonomi masyarakat. "Bencana bukan hanya

persoalan alam, tetapi juga berdampak langsung terhadap fiskal daerah dan keberlanjutan pembangunan," jelasnya.

Rio mengungkapkan, banjir bandang yang terjadi di Situbondo menimbulkan kerusakan infrastruktur, lahan pertanian, serta mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi ini memaksa Pemda melakukan realokasi anggaran yang cukup signifikan. "Tanpa dukungan fiskal yang memadai dari Pempus, daerah akan kesulitan menjaga keseimbangan pembangunan dan pelayanan publik," kata dia.

Oleh karena itu, ia meminta agar anggaran kebencanaan tidak lagi diposisikan sebagai faktor tambahan, melainkan menjadi variabel utama dalam perhitungan TKD. Kebijakan fiskal yang sensitif terhadap risiko bencana akan menciptakan keadilan antar daerah. "Daerah rawan bencana, membutuhkan afirmasi anggaran agar tidak tertinggal dalam pembangunan," pungkasnya. ■ TIF